

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Meningkatnya dinamika perdagangan internasional pada abad ke-15 ditandai dengan peningkatan permintaan pasar Eropa terhadap berbagai jenis hasil bumi khas kepulauan Nusantara seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis. Komoditas yang secara lokal-tradisional merupakan hasil hutan, menjadi primadona perdagangan lintas benua yang berkembang menjadi tanaman budidaya komersial.

Selepas monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC selama kurang lebih 200 tahun, kawasan Nusantara yang sepenuhnya telah dikendalikan oleh administrasi Belanda memasuki era liberalisme perdagangan dengan masuknya modal swasta internasional dalam rangka pengembangan tanaman industri. Fenomena tersebut tidak terlepas dari desakan kebutuhan bahan baku industri negara Eropa dan Amerika.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pengembangan tanaman penyedia bahan mentah industri seperti kapas, karet, dan tembakau yang bukan merupakan tumbuhan asli Indonesia, dilakukan semenjak pertengahan abad ke-19. Kedudukan pemodal swasta dalam perkebunan di Indonesia pada masa kolonial menjadi semakin besar ketika beberapa komoditi baru seperti karet dan teh mulai dikembangkan pertama kali di Jawa bagian barat hingga Sumatera dan Kalimantan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lihat artikel Bambang Purwanto. "Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia" dalam *website* (<http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php>, hlm.12), diunduh 31/8/2010 7:38 PM.

Ramainya Selat Malaka sebagai jalur ekonomi yang menghubungkan Asia-Eropa membuat daerah-daerah di sepanjang Pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya menjadi incaran para pengusaha Eropa untuk mengembangkan komoditas yang tengah laku keras di pasaran dunia.<sup>2</sup>

Sejarah kolonial antara 1870-1900 merupakan masa liberal,<sup>3</sup> pemerintah melepaskan peranan ekonomi dan menyerahkan eksploitasinya<sup>4</sup> kepada modal swasta. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870<sup>5</sup> adalah dasar bagi pembukaan lahan swasta secara besar-besaran di kawasan strategis Pesisir Timur Sumatera yang ternyata sangat cocok bagi tanaman tembakau. Oleh sebab itu hutan-hutan belantara di daerah Sumatera dibuka untuk dijadikan daerah

---

<sup>2</sup>Penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor di Pasaran Dunia seperti tembakau, karet, sawit, teh, dan rami. Lihat Arsip *Commissorial*, 19 November 1926, no. 31713, Arsip Nasional Republik Indonesia. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 4.

<sup>3</sup>Masa liberal di Hindia Belanda ditandai dengan dibukanya politik pintu terbuka bagi pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu dalam waktu singkat tanah subur di Hindia Belanda telah banyak disewa oleh pengusaha-pengusaha swasta yang bergerak di bidang tanaman ekspor seperti tembakau, karet, tebu, dan kopi. *Commissorial, ibid.*, no. 31713.

<sup>4</sup>Eksplorasi yaitu suatu proses ekonomi yang terjadi ketika suatu kelompok memaksa kelompok lain memberikan sesuatu yang lebih besar nilainya dari yang mereka terima. Lihat Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 620.

<sup>5</sup>Undang-undang Agraria Tahun 1870 menetapkan peraturan tata-guna tanah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Agraria, suatu alat produksi pokok yaitu tanah diliberalisasikan, maka terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk membuka perusahaan perkebunan, Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 80.

perkebunan. Pembukaan perkebunan di Deli, Serdang diikuti oleh perluasan ke daerah Langkat, Simalungun, dan Asahan memicu pendirian berbagai perusahaan pendukung lainnya.<sup>6</sup> Perkembangan perkebunan yang pesat di Sumatera Timur menjadi dasar pendirian berbagai perusahaan seperti kereta api Deli (*Deli Spoorweg Maatschappij*/DSM), *Deli Tanker Installation*, *Deli Haven Beheer*, telepon, perumahan, dan sewa gudang.

Pada tahun 1869, Jacobus Nienhuys bersama C.G. Clemen mendirikan perusahaan *Deli Maatschappij* dengan mendapat izin kontrak sewa tanah seluas 25.000 ha. Selama 20 tahun, antara tahun 1870-1890 merupakan tahun-tahun paling produktif bagi perkebunan tembakau di Sumatera Timur.<sup>7</sup> Demikianlah, Sumatera Timur menjadi sentra industri perkebunan tembakau. Namun krisis yang terjadi pada tahun 1891<sup>8</sup> memaksa para pengusaha mencari alternatif pengganti dan karet menjadi pilihan yang paling masuk akal walaupun harus dikelola dengan tenaga kerja dan modal besar.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth an Economic History of East Sumatra, 1863-1942* (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1977), hlm. 6.

<sup>7</sup>Jacobus Nienhuys adalah seorang pengusaha *onderneming* Belanda yang diberi kuasa oleh perusahaan dagang *Pieter van den Arend & Consortium*, sebuah asosiasi yang didirikan oleh para pedagang Rotterdam. Mereka berminat memperoleh perkebunan tembakau di Jawa, dan ia ditugaskan untuk mencari perkebunan yang dapat ditanami tembakau. *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>8</sup>Krisis tembakau terjadi akibat perubahan kebijakan proteksi tembakau Amerika Serikat yang menjadikan tembakau tidak laku di pasaran internasional. *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>9</sup>Clifford Geertz. *Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 17.

Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan secara besar-besaran membutuhkan modal, lahan, dan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya. Kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi dengan cara mendatangkan para pekerja kontrak dari luar negeri dan luar pulau yaitu dari Cina dan Pulau Jawa. Mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di perkebunan Sumatera Timur. Para pekerja dari Cina yang akan bekerja di perkebunan Sumatera Timur didatangkan melalui seorang makelar atau broker.<sup>10</sup> Selain mendatangkan tenaga kerja dari Cina melalui Biro Imigrasi, pengusaha-pengusaha perkebunan juga giat mencari tenaga kerja asal Jawa yang sudah diketahui sangat rajin dan memiliki keterampilan dalam bidang pertanian, sehingga akan mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan di perkebunan. Alasan lain, para pekerja dari Jawa bisa dibayar dengan upah yang rendah. Hal itu merupakan tawaran yang menarik bagi perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Timur. Pemanfaatan para pekerja kontrak dari Jawa yang bisa dibayar sangat rendah, membuat perusahaan-perusahaan perkebunan memperoleh laba yang semakin besar. Para pekerja adalah penentu terhadap keberadaan nilai suatu komoditas, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh kaum kapitalis berupa nilai lebih (*surplus value*), seharusnya

---

<sup>10</sup>Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra* (Singapore: Asia Research Institute National University of Singapore, 2005), hlm. 200.

merupakan hak dari para pekerja.<sup>11</sup> Proses pengambilan nilai lebih dari kaum pekerja oleh kaum kapitalis inilah yang disebut dengan eksploitasi.

Pengaruh swastanisasi di dalam sistem monopoli menyebabkan kesejahteraan rakyat semakin terpuruk karena seluruh kegiatan eksploitasi dimiliki oleh swasta. Dampak liberalisasi ekonomi di satu pihak sangat menguntungkan pemerintah dan pengusaha, tetapi di lain pihak merugikan rakyat karena terjadi eksploitasi tenaga kerja dengan pembayaran upah rendah.

Banyaknya pekerja yang didatangkan menimbulkan banyak masalah karena proses kedatangan mereka dilakukan dengan cara penipuan dan pemaksaan.<sup>12</sup> Para pekerja yang didatangkan dari Cina semuanya adalah laki-laki, sedangkan para pekerja Jawa terdiri dari laki-laki dan sedikit perempuan. Hal ini disebabkan adanya larangan pekerja membawa istri serta anak-anaknya, dan calon pekerja yang sudah menikah biasanya akan ditolak.<sup>13</sup>

Minimnya pekerja perempuan di Deli menjadikan pekerja laki-laki mendominasi staf perkebunan, mulai dari tingkat atas sebagai administrator sampai dengan tingkat bawah sebagai pekerja. Pada awal tahun 1900 tenaga kerja di perkebunan Deli berjumlah 55.000 orang dan hanya terdapat 10-20% tenaga

---

<sup>11</sup>Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.112.

<sup>12</sup>Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli, Politik, Kolonial pada Awal Abad ke-20* (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 1997), hlm. xxiii.

<sup>13</sup>Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979* (Yogyakarta: Karsa, 1995), hlm. 48.

kerja wanita. Menjelang tahun 1912 dari 100.000 etnik Cina hampir 93.000 orang adalah laki-laki.<sup>14</sup> Melihat perbandingan yang sangat timpang tersebut, kaum perempuan yang datang merupakan sumber daya langka dan menjadi titik pusat konflik antara orang Cina dan Jawa. Serangan-serangan terhadap administrator Eropa yang dilakukan oleh para pekerja karena adanya penyalahgunaan kekuasaan administrator terhadap pekerja perempuan yang sudah bersuami orang bumiputera.<sup>15</sup> Seringkali seorang pekerja perempuan dipanggil oleh seorang administrator di tengah jam kerjanya untuk kemudian “memisahkan diri” dari pekerja lain dan pergi bersamanya.<sup>16</sup>

Para pekerja perempuan yang rata-rata berusia muda kebanyakan berasal dari Jawa. Mereka tidak secara terang-terangan dipaksa untuk melacurkan diri dan hanya diberi sedikit pilihan selain berbuat demikian. Tugas mereka melayani kebutuhan seksual dan pelayanan rumah tangga umum untuk para pekerja laki-laki.

*Koeli Ordonnantie* tahun 1880 menetapkan gaji para pekerja sebesar 6 dollar per bulan untuk pekerja laki-laki. Pada masa itu, 1 dollar setara dengan 2 gulden, berarti mereka menerima 12 gulden sebulan. Nilai dollar kemudian mengalami penurunan menjadi 1 dollar setara dengan 1.10 gulden, sehingga

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 48-49.

<sup>15</sup>Reggie Baay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda* (Jakarta: Komunitas Bamboe, 2010), hlm. 142.

<sup>16</sup>Mulier, *Arbeids-Toestanden op de Oostkust van Sumatra* (Amsterdam: Nichols, T.,ed., 1903), hlm. 130.

pekerja laki-laki setiap bulan hanya menerima upah sebesar 4.40 dollar sedangkan pekerja perempuan menerima 2.20 dollar perbulan untuk segala keperluan hidupnya, seperti makan, minum, sabun, dan pakaian.<sup>17</sup> Sampai tahun 1894 upah seorang pekerja perempuan hanya separoh upah pekerja seorang lelaki dan tidak cukup untuk memenuhi keperluan makan sehari-hari, apalagi untuk keperluan lain.<sup>18</sup> Pekerja perempuan dapat dibayar dengan upah rendah karena kaum kapitalis cenderung mempekerjakan tenaga kerja tak terampil dengan upah lebih rendah ketimbang mempekerjakan tenaga kerja terampil dengan upah lebih tinggi. Menurut logika kapitalisme, majikan secara bertahap berupaya mencari tenaga kerja lebih murah yang cadangannya tersedia dalam tenaga kerja biasa.<sup>19</sup> Pekerja perempuan yang selama ini dianggap sebagai pekerja kelas dua, dapat dibayar dengan upah rendah. Para pekerja perempuan selain mendapat diskriminasi upah yang rendah juga mendapat pelecehan seksual baik dari kalangan para pekerja laki-laki maupun dari Administrator Eropa.<sup>20</sup>

Para pekerja perempuan yang usianya masih muda dan cantik dipaksa menjadi gundik administrator bangsa Eropa. Pada masa itu perempuan Asia di

---

<sup>17</sup>Henri. H. van Kol, *Uit Onze Kolonien* (Leiden: A.W. Sijthoff,1903), hlm. 97.

<sup>18</sup>Ann Laura Stoler, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>19</sup>George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 196.

<sup>20</sup>Reggie Baay, *op. cit.*, hlm. 142.

Hindia dijadikan komoditas dalam tangan lelaki kulit putih.<sup>21</sup> Mereka tidak punya pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya kecuali dengan menjadi pelacur, dan bersedia melayani pekerja laki-laki yang berjumlah besar di barak barak pekerja Cina.<sup>22</sup> Sebagian pekerja perempuan menjadi gundik/*nyai* bagi orang Eropa.<sup>23</sup> Para pekerja perempuan merupakan bagian dari umpan yang digunakan untuk memikat pekerja laki-laki ke Deli. Mereka sebagai pelipur lara agar para pekerja laki-laki betah di sana.<sup>24</sup> Kondisi seperti ini sengaja diciptakan agar perempuan tetap tersedia dan dapat memberikan pelayanan seksual.<sup>25</sup>

Kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja perempuan menyebabkan tingginya jumlah penderita penyakit sipilis. Seorang manajer di sebuah

---

<sup>21</sup>Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 47.

<sup>22</sup>J. van den Brand adalah seorang pengacara di Medan, perjalanannya ke Sumatera Timur pada tahun 1904 dituangkan dalam brosur yang berjudul *De Millioenen uit Deli*.

<sup>23</sup>*Njahi (nyai)* adalah gelar terhormat untuk seorang wanita tua tanpa gelar lainnya. Di Indonesia modern masih digunakan di Jawa Barat dan Madura sebagai panggilan untuk istri seorang kyai. Lihat D.G Stibbe, (Redactie), *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, vol. 3 (Leiden: NV. V. I. E. J. Brill, 1921), hlm. 36. Kata *nyai* dalam bahasa Bali, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa adalah perempuan (muda), adik perempuan, dan juga dipakai sebagai istilah panggilan. Lihat juga Tinneke Hellwig, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>25</sup>Ann Laura Stoler, *op. cit.*, hlm. 50.



perkebunan mengeluh bahwa dari 60 orang pekerja perempuan, sebanyak 35 orang dimasukkan ke rumah sakit karena sipilis.<sup>26</sup>

Dampak dari eksploitasi terselubung yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap para pekerja, khususnya pekerja perempuan adalah menyebarnya penyakit kelamin dan anak-anak yang lahir diluar nikah. Selain itu juga menyebabkan terjadinya pergundikan. Beberapa di antaranya melarikan diri, bunuh diri, atau menjadi gila.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam tesis berjudul "Eksploitasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930" ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi para pekerja di perkebunan Deli Sumatera Timur pada tahun 1870-1930.
2. Bagaimana terjadinya eksploitasi terhadap para pekerja perempuan di perkebunan Deli Sumatera Timur.
3. Bagaimana dampak eksploitasi terhadap para pekerja perempuan di perkebunan Deli Sumatera Timur.

## **B. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah sangat penting, terutama sebagai pedoman dalam pengumpulan sumber dan pembahasan permasalahan.

---

<sup>26</sup>Henri. H. van Kol, *op.cit.*, hlm. 98.

Tesis ini mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu lingkup spasial, temporal, dan keilmuan.

#### 1. Lingkup spasial

Lingkup spasial penelitian ini adalah daerah Deli yang secara administrasi berada di wilayah Keresidenan Sumatera Timur. Dasar pertimbangan pemilihan daerah tersebut karena Deli adalah salah satu daerah di Sumatera Timur yang paling banyak memiliki perusahaan perkebunan tembakau dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 1891 tercatat sebanyak 170 perkebunan telah beroperasi di Deli. Tanahnya yang subur merupakan kunci untuk pertumbuhan daerah *onderneming*. Hal ini menarik perhatian para pengusaha untuk membuka lahan-lahan luas yang akan ditanami tembakau.

Selain cocok untuk tanaman tembakau, tanah di Deli juga sangat cocok untuk penanaman komoditi ekspor lain seperti, karet, sawit, teh, rami atau sisal.<sup>27</sup> Tanaman ekspor ini sebagian besar dikelola perkebunan besar milik asing baik pengusaha Belanda maupun pengusaha asing lainnya. Sebelum kedatangan Belanda, wilayah Sumatera Timur merupakan hutan belantara yang memiliki keuntungan ekonomis kecil.<sup>28</sup> Namun dalam beberapa dekade terbukti bahwa wilayah Sumatera Timur, khususnya Deli berubah menjadi salah satu daerah penghasil komoditi ekspor tembakau terpenting di Hindia Belanda.

---

<sup>27</sup>Arsip *Commissorial*, *op.cit.*, no. 31713.

<sup>28</sup>Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 2.

## 2. Lingkup Temporal

Ruang lingkup temporal penelitian ini dibatasi pada tahun 1870-1930. Tahun 1870 dipilih sebagai awal periode penelitian, karena pada tahun tersebut dimulainya periode liberal yang ditandai dengan penerapan Undang-undang Agraria. Undang-undang tersebut memberi lebih banyak ruang bagi pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya secara besar-besaran.

Pada masa ini industri tembakau, karet, sawit, dan barang komoditi ekspor lainnya mengalami perkembangan pesat sehingga memicu pengadaan lahan seluas-luasnya dan perekrutan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Tenaga kerja didatangkan dari berbagai daerah seperti dari Penang dan Jawa. Demikian juga pekerja perempuan, sekitar tahun 1875 mereka didatangkan dari Pulau Jawa bersamaan dengan kedatangan para pekerja laki-laki.<sup>29</sup> Pada awal kedatangannya jumlah pekerja perempuan hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki yaitu 4:1, atau hanya 8%. Melihat perbandingan tersebut pekerja perempuan yang datang ke perkebunan merupakan sumber daya langka dan menjadi titik pusat konflik antara pekerja Cina dan Jawa. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pekerja terhadap administrator Eropa karena adanya penyalahgunaan kekuasaan administrator terhadap pekerja perempuan.

Tahun 1930 dipilih sebagai akhir periode penelitian karena pada tahun tersebut mulai berkurangnya kegiatan prostitusi dan pergundikan di perkebunan

---

<sup>29</sup>Jan Breman, *op.cit*, hlm. 59

Deli. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan penghapusan larangan menikah untuk orang Eropa yang akan bekerja sebagai pegawai di perkebunan. Ketentuan lain adalah perusahaan perkebunan menganjurkan untuk membentuk keluarga, baik bagi pegawai Eropa maupun pegawai Pribumi.<sup>30</sup> Ketentuan tersebut memberikan andil besar terhadap berkurangnya kegiatan prostitusi dan pergundikan di perkebunan tembakau Deli.<sup>31</sup>

Berkurangnya kegiatan pergundikan bersamaan dengan munculnya gerakan nasionalis dari masyarakat pribumi. Kesadaran nasionalis yang berkembang pada tahun 1920 tidak menyetujui perempuan Indonesia hidup dalam pergundikan dengan orang Eropa.

### 3. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dari tesis ini adalah sejarah sosial yang akan membahas aspek kehidupan masyarakat perkebunan pada masa kolonial abad ke-19 dan abad ke-20. Subjek penelitian dipilih aspek tenaga kerja yaitu eksploitasi pekerja perempuan di perkebunan Deli, yang merupakan bagian dari suatu masyarakat perkebunan. Eksploitasi terhadap para pekerja baik laki-laki maupun perempuan

---

<sup>30</sup>Pada tahun 1919 *Deli Maatschappij* melakukan penghapusan terhadap ketentuan larangan pernikahan bagi para pegawainya. Sebenarnya pada tahun 1912 sudah mulai dihapuskan ketentuan pernikahan di dalam kontrak kerja orang Eropa. Peraturan tersebut memberikan andil besar terhadap berkurangnya pergundikan di Deli pada tahun 1920-1930. Reggie Baay, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

dilakukan oleh para pengusaha perkebunan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dengan cara memberlakukan *Koelie Ordonnantie* dan *poenale sanctie*.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Perumusan permasalahan dalam tesis ini perlu dilakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya penting hasil penelitian yang mempunyai relevansi terhadap pokok bahasan dengan tesis ini. Beberapa karya yang membahas tentang pekerja-pekerja di perkebunan khususnya di Sumatera Timur, adalah dari Jan Breman yang berjudul *Menjinakkan Sang Koeli*.<sup>32</sup> Buku ini mengungkap praktek keji politik kolonial Belanda terhadap puluhan ribu pekerja asal India, Cina, dan Jawa serta daerah-daerah lain di Pantai Timur Sumatera yang dipekerjakan di kawasan perkebunan Sumatera Timur pada sekitar peralihan abad ke -19 dan abad ke-20.

Permasalahan yang dikupas dalam buku Breman adalah sekitar seratus ribu pekerja di daerah Sumatera Timur yang tidak mempunyai hak untuk melepaskan diri dari kontrak kerja yang telah dibuat dengan pihak perkebunan sebelum berangkat ke Deli. Para pekerja yang berani menghentikan kontrak kerja dan melarikan diri, akan menerima hukuman berat yang disebut dengan *poenale sanctie* (sanksi hukuman).

---

<sup>32</sup>Jan Breman, *Menjinakkan Sang Koeli* terjemahan dari *Koelis, Planters en Koloniale Politiek* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997).

Breman menggunakan analisis sosiologis untuk mengungkapkan penderitaan para pekerja di perkebunan. Pengungkapan fakta sejarah yang terpendam dalam arsip-arsip kerajaan Belanda selama 90 tahun telah membuktikan betapa kejinya politik penjajah Belanda sekitar abad ke-19 dan abad ke-20. Breman juga menggali arsip-arsip berupa laporan yang dibuat oleh Rhemrev, seorang Jaksa Tinggi yang ditugaskan menilai pelaksanaan ordonansi kuli (*Koeli Ordonnantie*) pada tahun 1903. Selain itu juga berdasarkan tulisan J. van Brand seorang pengacara di ibu kota Keresidenan Sumatera Timur, Medan. Tulisan tersebut dituangkan dalam brosurnya berjudul "*De Millioenen uit Deli*", yang mengacu kepada keuntungan berupa jutaan gulden kekayaan yang digali dari perkebunan-perkebunan besar di Deli. Isi brosur khususnya menyoroti kasus-kasus berkenaan dengan penerapan ordonansi serta sanksi hukumannya (*poenale sanctie*). Brosur tersebut di samping memaparkan kekejian dan kekejaman perlakuan terhadap pekerja Jawa dan Cina, juga secara serentak menggugah perasaan keadilan dan perikemanusiaan sebagian lapisan cendekiawan Belanda.

Relevansi buku Jan Breman dengan penelitian ini adalah mengupas tentang eksploitasi buruh di perkebunan Sumatera Timur, terutama pada bab V berjudul Masyarakat Perkebunan dan Orde kolonial. Bab tersebut membahas tentang minimnya jumlah pekerja perempuan pada tahun 1884 hanya berjumlah 148 orang, sedangkan jumlah pekerja laki-laki berjumlah 540 orang. Hal ini berarti empat berbanding satu. Beberapa di antara pekerja perempuan ada yang hidup tanpa menikah dengan pekerja laki-laki. Adanya asisten atau staf Eropa yang

menjalin hubungan dengan perempuan Jawa yang sudah bersuami bumiputera sehingga menyebabkan terjadinya serangan terhadap staf Eropa oleh pekerja laki-laki.

Tesis ini lebih difokuskan kepada pekerja perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para pengusaha perkebunan sehingga terjadi eksploitasi terhadap pekerja perempuan. Eksploitasi terselubung yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap para pekerja khususnya pekerja perempuan menyebabkan mereka hidup di bawah standar kesejahteraan. Hal ini tercermin dari penghasilan pekerja perempuan yang dibayar kurang dari 11 sen sehari, sedangkan biaya makan sehari diperlukan 13 sen.<sup>33</sup> Dengan demikian, untuk biaya makan saja tidak cukup, apalagi untuk biaya membeli pakaian dan sabun mandi. Sumber lain menyebutkan jika mereka hanya dibayar 7,50 sen sehari.<sup>34</sup> Upah yang demikian rendah menyebabkan mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu Karl J. Pelzer dalam buku *Toeang Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*<sup>35</sup> membahas tentang situasi konflik antara para pengusaha perkebunan, sultan-sultan Indonesia dan pemerintah Hindia

---

<sup>33</sup>J. van den Brand, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>34</sup>Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 115.

<sup>35</sup>Karl J. Pelzer, *Toeang Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863-1947* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

Belanda di Medan yang pada waktu itu merupakan ibukota Sumatera Timur. Konflik tersebut menyangkut urusan tanah yang diduduki oleh para pengusaha perkebunan atas dasar perjanjian pinjam sewa, sehingga para sultan kehilangan hak atas tanah-tanah itu. Ketiga pihak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut namun mereka tidak dapat menyepakati syarat-syarat yang diperlukan. Persyaratan tersebut bertujuan untuk melindungi hari depan kedua belah pihak tanpa menyinggung kepentingan keuangan para sultan.

Permasalahan tanah bermula ketika Jacobus Nienhuys mendarat di pinggir Sungai Deli. Tanpa disadari tanah yang diinjaknya sangat subur dan cocok untuk penanaman tembakau gulung, bahkan untuk tanaman keras komoditi ekspor seperti karet, teh, sawit, dan rami. Ketika mengetahui besarnya nilai tembakau gulung yang ditanam di tanah Deli dan wilayah sekitarnya, maka berbondong-bondonglah para pengusaha asing datang ke Sumatera Timur.

Para penguasa setempat (sultan) yang haus akan kekayaan tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat, dengan senang hati memberikan konsesi-konsesi kepada semua pengusaha perkebunan yang datang ke Deli. Konsesi tanah pada awalnya hanya untuk 90 tahun, kemudian menjadi 75 tahun. Dalam suatu ekspansi perkebunan yang drastis jumlah perusahaan tembakau terus bertambah. Pada tahun 1872 berjumlah 22, tahun 1880 berjumlah 49, dan tahun 1888 berjumlah 148 perusahaan. Dari sinilah timbul perampasan hak agraria rakyat yang kemudian menimbulkan berbagai konflik.



Relevansi buku tersebut dengan penelitian ini adalah terdapatnya informasi tentang awal mula dibukanya perkebunan di Sumatera Timur secara besar-besaran sejak kedatangan Jacobus Nienhuys. Para pengusaha perkebunan di Sumatera Timur mengalami kesulitan dalam menangani para pekerja. Pertama, banyaknya pekerja yang didatangkan dari seberang lautan melarikan diri. Kedua, terjadinya penyerangan terhadap anggota-anggota staf perkebunan oleh para pekerja perkebunan. Penyerangan dilakukan oleh para pekerja yang merasa dendam karena mereka sering mendapat perlakuan kejam dari para asisten seperti adanya perkataan kasar dan penyiksaan fisik.

Melihat situasi seperti ini maka pemerintah Hindia Belanda segera mengambil tindakan dengan mendirikan Jawatan Inspeksi Perburuhan Propinsi Luar.<sup>36</sup> Jawatan tersebut bertanggung jawab agar para pengusaha perkebunan tidak menyalahgunakan wewenangnya terhadap para pekerja, melainkan harus memberikan semua kemudahan berdasarkan hukum. Pemerintah Hindia Belanda juga sudah berusaha untuk menghapus sistem buruh kontrak tetapi ditentang keras oleh para pengusaha perkebunan, terutama pengusaha perusahaan tembakau.

Keputusan Senat Amerika pada tahun 1930 yang dituangkan dalam undang-undang tarif baru tentang larangan impor produk-produk yang dihasilkan oleh pekerja hukuman, secara tidak langsung membantu dalam menghapuskan

---

<sup>36</sup>Inspektorat Perburuhan Pemerintah (*Arbeids Inpectie*) yang di bentuk pada tahun 1907. Jawatan ini bertugas untuk menyelidiki kondisi perburuhan serta menghentikan kesewenang-wenangan yang berlebihan dalam kontrak perburuhan.

sistem buruh kontrak dan sanksi pidana di semua perusahaan tembakau yang menjadi anggota. Undang-undang *Blaine Amandement* memperluas larangan dengan mencabut izin impor untuk komoditi yang dihasilkan oleh buruh kontrak. Undang-undang tersebut tidak menetapkan tanggal akhir bagi penyelesaian penghapusan itu, namun penyerbuan Jepang ke Hindia Belanda mengakhiri kontrak-kontrak buruh tersebut.

Ann Laura Stoler dalam buku *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*,<sup>37</sup> membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Timur. Pada tahun 1870 Sumatera Timur merupakan jantung perkebunan kolonial. Buku tersebut menjelaskan strategi-strategi pengendalian (kontrol) buruh yang diwarnai dengan masalah gender. Pengusaha perkebunan kolonial telah melibatkan penduduk ke dalam sistem kapitalis dunia. Dalam buku ini dapat ditemukan gambaran mengenai lingkaran-lingkaran produksi rakyat, komoditi, dan konsumsi yang menyentuh perkantoran pusat Uniroyal di Akron, Ohio. Terdapat juga sekumpulan pabrik sabun Palmolive di Belanda, dan kampung Jawa yang bertebaran di kawasan Perkebunan Sumatera.

Stoler membahas sistem pekerja kontrak di perkebunan Deli Sumatera Timur yang mendapat reputasi buruk dari kaum Sosialis Belanda seperti Henri H. van Kol dan J. van den Brand. Mereka membandingkan kondisi kerja dan hidup

---

<sup>37</sup> Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979* (Yogyakarta: Karsa, 1995).

kaum pekerja di perkebunan Deli dengan ‘perbudakan modern’. Stoler lebih fokus kepada keadaan ekonomi dan sosial komunitas Jawa yang banyak bermukim di pinggiran perkebunan, dan hampir semuanya pernah bekerja di perkebunan. Mereka bekerja di perkebunan dengan status pekerja lepas, dengan upah lebih kecil dibandingkan pekerja kontrak.

Relevansi buku Stoler dengan tesis ini terutama pada bab II yang membahas tentang eksploitasi terhadap pekerja kontrak. Pada bab II halaman 50-55 membahas tentang Perempuan dan Kontrol (pengendalian) Perburuhan. Stoler juga membahas tentang upah pekerja perempuan pada tahun 1894 hanya separo dari upah pekerja laki-laki. Pada tahun 1912 jumlah pekerja di perkebunan 100.000 orang dan jumlah pekerja laki-laki 93.000 orang. Hal ini berarti jumlah pekerja perempuan sebanyak 7.000 orang. Stoler juga membahas tentang meluasnya prostitusi dan penyakit kelamin di kalangan masyarakat perkebunan. Para pekerja perempuan tidak mempunyai tempat tinggal atau barak sehingga mereka tidur di barak laki-laki. Keterkaitan tesis ini dengan buku Ann Laura Stoler adalah sama-sama membahas tentang pekerja perempuan. Namun tesis ini lebih difokuskan kepada eksploitasi dan dampaknya terhadap pekerja perempuan.

Mohammad Said dalam bukunya *Suatu Zaman Gelap di Deli: Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Dengan Derita dan Kemarahannya*,<sup>38</sup> menjelaskan tentang dampak dari keberadaan perkebunan tembakau terhadap kesultanan dan

---

<sup>38</sup>Mohammad Said, *Suatu Zaman Gelap di Deli: Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya* (Medan: Waspada, 1977).

masyarakat di Sumatera Timur, serta hubungannya dengan Pemerintah Belanda. Buku tersebut membahas praktek *Koeli Ordonnantie* dan *poenale sanctie* serta ketentuan-ketentuan dalam pasal peraturan tersebut. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang pencantuman identitas bagi setiap pekerja yang akan menandatangani kontrak, ketentuan jam kerja, cara pembayaran gaji, uang panjar, dan lamanya kontrak. Ketentuan lain yang juga dibahas dalam buku ini adalah hak majikan dan kewajiban pekerja.

Mohammad Said juga membahas tentang *Koelie Ordonnantie* yang memuat ketentuan hukuman badan bagi kaum pekerja yang melanggar. Oleh sebab itu *Koeli Ordonnantie* diberi julukan *poenale sanctie*. Para pekerja yang melanggar ketentuan tersebut akan diseret ke pengadilan dan pekerja yang dianggap malas akan diganjar hukuman badan. Penganiayaan dan tendangan majikan diterima para pekerja apabila mereka dianggap bersalah. Itulah ketentuan yang berlaku di Sumatera Timur dan merupakan realisasi dari *modern slavernij* (perbudakan modern) di bawah bendera Belanda.

#### **D. Kerangka Teoritik dan Pendekatan**

Kerangka teoretis menerangkan pengertian-pengertian atau konsep dasar tentang topik yang diangkat dalam penulisan ini. Menyoroti masalah perburuhan di perkebunan Deli Sumatera Timur diperlukan konsep, teori, dan pendekatan yang relevan dengan tema yang diangkat. Perangkat metodologi ini dibutuhkan untuk menjadikan tesis ini tidak saja sebagai sejarah deskriptif naratif tetapi yang lebih

penting adalah sebagai sejarah yang diskriminatif analitis. Langkah penting dalam analisis sejarah adalah membuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teoritis yang mencakup pelbagai konsep dan teori yang akan dipakai untuk menganalisis peristiwa tersebut.<sup>39</sup>

Tesis ini mengambil judul "Eksploitasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930". Penerapan kerangka konseptual akan lebih mudah jika terlebih dahulu dijelaskan pendekatan yang relevan dengan tema yang akan diangkat. Fokus dari penelitian ini adalah eksploitasi pekerja perempuan di perkebunan Deli yang merupakan bagian dari suatu masyarakat perkebunan. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi khususnya konsep yang membahas tentang kehidupan masyarakat atau kelompok.<sup>40</sup> Pendekatan sosiologi dapat dikaji mengapa dibentuk kelompok, mengapa mereka hidup dan bagaimana hubungan sosial mereka.<sup>41</sup> Hal yang menarik untuk dibahas adalah adanya ketegangan atau konflik sosial dan adanya kelas penguasa dan kelas masyarakat. Keadaan tersebut mengkondisikan

---

<sup>39</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Utama, 1993), hlm. 2.

<sup>40</sup>Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 45-50.

<sup>41</sup>Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.

masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yaitu kaum pemilik modal (kapitalis) dan kaum pekerja sebagai buruh.<sup>42</sup>

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan utama dalam tesis ini adalah teori tentang eksploitasi. Karl Marx dalam bukunya *Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*,<sup>43</sup> membicarakan eksploitasi dalam konteks eksploitasi oleh kaum borjuis atau kelas bermodal yang menguasai alat-alat produksi terhadap kaum proletar, yaitu kelas buruh yang diperas tenaganya. Imbalan upah atas hasil kerja para buruh pada umumnya jauh di bawah nilai jual komoditi yang dihasilkannya.

Eksplorasi tenaga kerja menurut paham Marxis adalah pemberian imbalan yang tidak wajar kepada pekerja di mana jumlahnya kurang dari jumlah total produksi setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan barang-barang modal.<sup>44</sup> Eksploitasi tenaga kerja ini berbentuk pembayaran upah yang sangat rendah kepada pekerja dibanding dengan hasil marjinalnya atau keuntungan yang diperoleh. Secara sederhana eksploitasi tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai pemaksaan kepada tenaga kerja untuk bekerja tanpa henti dan istirahat sehingga melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan Eksploitasi ini menyebabkan

---

<sup>42</sup>Franz Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 89.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm.113.

<sup>44</sup>George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 208.

terjadinya proses ekonomi yaitu suatu kelompok memaksa kelompok lain memberikan sesuatu yang lebih besar nilainya dari yang mereka terima.<sup>45</sup>

Relevansi teori Karl Marx dengan tesis ini adalah adanya kesamaan di antaranya adalah:<sup>46</sup>

- Adanya monopoli modal oleh pemilik-pemilik modal, dalam hal ini pemilik modal diperkebunan Deli adalah para pengusaha perkebunan..
- Munculnya perusahaan raksasa dan sejumlah kecil perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar sektor ekonomi, dalam hal ini *Deli Maatschappij* diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya di Sumatera Timur.
- Para pemegang saham mayoritas yang mengontrol sistem kapitalis, dalam hal ini para pengusaha perkebunan sebagai pemegang saham.
- Adanya pengendalian manajerial dalam mengendalikan tenaga kerja yaitu dengan cara manajerial. Demikian pula di perkebunan Deli Sumatera Timur yang pada awalnya pengelolaan perkebunan secara pribadi/perorangan, namun karena perkembangan perkebunan yang demikian pesat maka diperlukan manajerial.
- Manajemen sebagai proses memimpin tenaga kerja bertujuan untuk mengendalikan tenaga kerja di dalam perusahaan dengan cara menspesialisasikan pekerjaan. Demikian pula di Deli Sumatera Timur

---

<sup>45</sup>Stephen K. Sanderson, *op.cit.*, hlm. 620.

<sup>46</sup> Ritzer-Douglas, *op.cit.*, hlm. 27-34.

pelaksanakan pekerjaan, para pekerja dispesialisasikan berdasarkan etnis. Meningkatkan kontrol manajemen jauh lebih mudah mengontrol pekerja yang mengerjakan tugas khusus daripada mengontrol pekerja yang menggunakan keterampilan berskala.

Beberapa cara yang dipergunakan oleh kaum kapitalis untuk meningkatkan nilai lebih antara lain dengan menambah jam kerja, intensitas kerja, pengetatan kontrol terhadap pekerja, dan penggantian tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan dapat dibayar dengan upah rendah. Hal ini dilakukan karena kapitalisme memusatkan diri pada upaya pemupukan modal, sehingga segala macam strategi yang dilakukan diarahkan pada *ekstraksi* nilai surplus untuk akumulasi modal. Strategi tersebut mengakibatkan kehidupan pekerja terutama pekerja perempuan menjadi terpuruk karena adanya diskriminasi dalam pengupahan.

Berdasarkan kenyataan objektif, pekerja perempuan memiliki status subordinasi ganda. Artinya di satu pihak, mereka bersama pekerja laki-laki merupakan bagian dari alat produksi yang berfungsi sebagai penghasil produk, namun di lain pihak pekerja perempuan mengalami penindasan akibat status *gender* perempuannya. Hal ini berkaitan dengan mitos dan *stereotype* yang diciptakan untuk mereka. Para pekerja perempuan dikenal sebagai pekerja ideal yang terampil, rajin, teliti, patuh, dan murah. Mereka menjadi pekerja yang paling



mudah diatur dan tidak banyak menuntut. Citra semacam ini dimanfaatkan dengan baik oleh kaum kapitalis untuk mengakumulasi modalnya.<sup>47</sup>

Di bawah sistem kapitalis para pekerja harus bekerja atas dasar paksaan, bukan atas kemauannya sendiri.<sup>48</sup> Hasil kerja mereka dikuasai oleh pemilik perkebunan dan kaum kapitalis. Dengan demikian mereka hanya bekerja untuk mempertahankan hidupnya, bukan untuk pengembangan diri.

Konsep upah yang digagas oleh Adam Smith menyatakan bahwa ketika upah yang diterima pekerja jumlahnya di bawah kebutuhan subsistensi, maka akan banyak kaum pekerja yang sengsara. Sebaliknya jika upah yang diterima di atas subsistensi, maka kesejahteraan pekerja akan meningkat. Ternyata upah yang diterima pekerja jumlahnya di bawah kebutuhan subsistensi, sehingga menyebabkan keterpurukan nasib kaum pekerja.<sup>49</sup> Hasrat untuk memperoleh keuntungan besar, menjadi landasan kaum kapitalis untuk menerapkan upah subsistensi. Hasil kerja para pekerja jauh lebih besar dibandingkan dengan upah yang mereka terima dari hasil kerjanya.

Pekerja pada masa kolonial disebut kuli. Pemakaian istilah buruh atau kuli sebagai kata ganti untuk menyebut tenaga kerja kasar masih belum lagi populer.

---

<sup>47</sup>Indrasari Tjandraningsih, "Buruh Perempuan Menguak Mitos," dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed), *Sangkan Peran Gender* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2006), hlm. 254.

<sup>48</sup>Ritzer-Douglas, *op.cit.*, hlm. 199.

<sup>49</sup>Mark Skousen, *op.cit.*, hlm. 115.

Tenaga kerja kasar yang dipakai di berbagai belahan dunia pada waktu itu disebut budak (*slave*).<sup>50</sup> Tenaga budak sangat diandalkan untuk bekerja pada berbagai sektor. Sejak abad ke-17, tenaga kerja budak terutama sekali digunakan pada sektor perkebunan yang banyak dikelola oleh orang-orang Eropa di daerah-daerah koloni mereka yang tersebar di Afrika, Amerika, dan Asia.

Istilah kuli berasal dari bahasa Tamil dengan ejaan Inggris yaitu *Cooli* artinya adalah orang yang mengambil upah dengan menggunakan kemampuannya dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang diminta.<sup>51</sup> Pengertian kuli sama saja dengan pengertian sekarang yaitu “buruh atau pekerja”.

*Encyclopedie van Nederlandsch Indie* mendefinisikan kuli sebagai “orang yang disewa”, yang didatangkan dari daerah yang jumlah penduduknya padat dan miskin, setelah sampai di tempat pekerjaannya dikenakan seperangkat aturan tertentu, yang tujuannya untuk mengikat mereka terhadap pekerjaannya.<sup>52</sup> Kuli terutama menunjukkan pekerja yang aktif di perkebunan, pertambangan, dan industri.

---

<sup>50</sup>Anatona, “Antara Buruh Dan Budak: Nasib Kuli kontrak di Sumatera Timur Pada Akhir Abad ke-19 Hingga Awal Abad ke-20” (Makalah pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta 5-7 Juli 2011).

<sup>51</sup>Muhammad Said, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>52</sup>*Encyclopedie van Nederlandsch Indie, op.cit.*, hlm. 360-366.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kuli-kuli dari Jawa merupakan pekerja yang mencari upah. Mereka adalah pekerja upahan yang dikenakan sanksi hukuman seandainya melanggar aturan-aturan kerja, seperti datang terlambat ke tempat kerja, melarikan diri dari perkebunan atau malas bekerja.

Pada masa awal perintisan perkebunan tahun 1880, pekerja dibagi dua istilah yaitu pekerja kontrak (disebut kuli kontrak) dan pekerja lepas, perbedaan tersebut terletak pada lamanya pekerjaan. Pekerja kontrak mempunyai masa kerja yang lama dan pekerja lepas mempunyai masa kerja yang singkat dan bersifat borongan. Apabila pekerjaan telah selesai sampai waktunya maka berakhirilah kontrak kerjanya. Para pekerja mendapat imbalan upah sebanyak dua kali yang diberikan pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang pada garis besarnya terdiri dari empat langkah secara berurutan yaitu sebagai berikut:

a. Heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah.

Sumber-sumber sejarah yang sudah terkumpul dijadikan bahan informasi untuk penulisan tesis. Sumber-sumber tertulis berupa arsip, terbitan pemerintah, buku, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian, koran atau

harian seaman, jurnal, majalah, terbitan berkala, laporan-laporan statistik, dan sebagainya.

Pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berbentuk rekaman tertulis (*written record*) diperoleh dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia antara lain *Besluit*, *Algemeene Vereniging Rubber Sumatera Oostkust*, *Algemeene Secretarie*, *BGS (Brieven Gouvernement Secretarie)*, *MGS (Missive Gouvernement Secretarie)*, dan sebagainya. Selain sumber-sumber arsip juga dipergunakan sumber-sumber tercetak lainnya berupa laporan-laporan resmi dari pemerintah kolonial Belanda seperti *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, *Koloniaal Verslag*, *Staten General Handelingen Tweede Kamer*, *Indisch Verslag*, dan *Jaarverslag*.

- b. Kritik sumber, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan menguji apakah sumber-sumber sejarah yang ditemukan itu otentik dan bisa dipercaya (*kredibel*) baik dalam bentuk maupun isinya. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mencari informasi-informasi yang bisa dipercaya dari sumber-sumber sejarah, atau untuk menemukan fakta sejarah. Untuk menguji keaslian sumber dilakukan kritik intern (*kredibilitas*) yaitu menentukan sifat sumber dan kritik ekstern (*otentisitas*) yaitu untuk mengetahui keaslian sumber, apakah sumber itu asli, turunan atau bahkan sudah diubah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 80-111.

- c. Interpretasi, adalah kegiatan menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta sejarah berdasarkan hubungan kronologis dan sebab akibat dengan melakukan imajinasi, interpretasi, dan analisis. Dalam hal ini dari banyak fakta sejarah yang telah diperoleh harus dirangkaikan atau dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, menurut rangkaian kronologis dan hubungan sebab akibat.
- d. Historiografi atau rekonstruksi sejarah, yaitu kegiatan melakukan rekonstruksi peristiwa masa lalu dalam bentuk kisah sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 6 bab yang secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi 6 sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang dan permasalahan yang menjelaskan uraian dari perkebunan di Sumatera Timur dan para pekerja yang bekerja di perkebunan-perkebunan tersebut, ruang lingkup penelitian dan alasan pemilihan tema penelitian. Sub bab kedua berisi rumusan permasalahan, yaitu permasalahan yang akan dibahas atau dianalisis dalam penulisan tesis. Ketiga adalah kerangka teoretis, yaitu kerangka berpikir peneliti yang mengacu pada konsep-konsep atau teori-teori mengenai eksploitasi, kapitalisme, dan pekerja perkebunan. Keempat adalah tinjauan pustaka, kelima metodologi, dan yang terakhir adalah sistematika

penulisan yang merupakan penjelasan sistematis dari bab-bab yang ditulis dalam tesis.

Bab II menguraikan gambaran Sumatera Timur terutama Deli, meliputi letak geografis dan iklim. Kondisi demografis yang menjelaskan keadaan penduduk Sumatera Timur dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, masyarakat Melayu yang mendiami daerah pesisir pantai di Sumatera Timur dan masyarakat Batak yang mendiami daerah pedalaman di Sumatera Timur. Kondisi sosial ekonomi (1870-1930), sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang dilakukan secara berhumas. Mereka telah memadukan sistem pertanian tradisional dengan tanaman lada. Kemampuan masyarakat di Sumatera Timur selain menanam lada juga menanam tembakau. Penanaman tembakau Deli sangat penting karena tanaman inilah yang kemudian membuat Deli terkenal ke seluruh dunia.

Bab III membahas tentang kondisi masyarakat perkebunan, perekrutan pekerja, dan kondisi sosial ekonomi pekerja di Sumatera Timur. Kondisi masyarakat perkebunan di Sumatera Timur lebih multirasial karena terdiri dari berbagai bangsa seperti Eropa, Asia, dan Jawa atau pribumi lainnya (Melayu dan Batak). Perekrutan pekerja dilakukan sehubungan dengan pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran di Sumatera Timur oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kehidupan ekonomi para pekerja dipengaruhi oleh hirarki yang ada di perkebunan, demikian pula upah yang di terima oleh masyarakat perkebunan juga dibayar sesuai dengan

hirarkinya. Selain perbedaan upah yang mencolok, terdapat juga perbedaan tempat tinggal untuk pekerja Jawa dan Cina yang ditempatkan dalam barak-barak. Barak-barak tersebut sangat kotor dan pengap sehingga sering menjadi daerah *epidemi* penyakit seperti malaria, beri-beri, tipus, cacangan, TBC, bahkan disentri yang menjadi penyebab kematian.

Bab IV membahas tentang eksploitasi pekerja perempuan. Eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha perkebunan terhadap para pekerja perempuan pertama, mereka memanfaatkan pekerja perempuan yang merupakan hasil dari sosialisasi ketimpangan *gender*. Pekerja perempuan sangat memenuhi syarat dalam strategi penekanan biaya produksi. Kedua, adanya industri perkebunan yang membayar upah sangat rendah kepada pekerja perempuan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di antara pekerja perempuan banyak yang melakukan kegiatan prostitusi. Ketiga, para pekerja perempuan ditempatkan berdasarkan ras dan senioritas. Kalangan Eropa akan mendapatkan hak lebih dahulu terhadap pekerja perempuan yang baru didatangkan dari Jawa, setelah itu pekerja laki-laki senior yang telah menetap selama 6 tahun di perkebunan. Selain adanya penyiksaan fisik terhadap para pekerja perempuan, mereka juga harus bersedia memenuhi kebutuh seks para pengusaha perkebunan.

Bab V membahas dampak eksploitasi terhadap pekerja perempuan yang terdiri dari dampak fisik, moral, dan dampak psikis. Dampak fisik yang ditimbulkan akibat adanya eksploitasi yaitu tersebarinya penyakit kelamin dan adanya anak-anak yang lahir di luar nikah. Dampak moral yang ditimbulkan

adanya pergundikan yang tersebar luas di perkebunan. Dampak psikis akibat eksploitasi ini banyak di antara pekerja perempuan yang melarikan diri, bunuh diri, menjadi gila atau kembali ke daerah asal mereka apabila kontrak mereka berakhir

Bab VI Simpulan. Masuknya perkebunan asing ke Sumatera Timur ternyata tidak membawa perubahan pada sektor perekonomian penduduk setempat. Terjadinya eksploitasi terhadap pekerja perempuan di perkebunan Deli disebabkan karena adanya industri perkebunan yang membayar upah sangat rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan kegiatan prostitusi yang mengakibatkan tingginya jumlah penderita penyakit sipilis dan lahirnya anak-anak di luar pernikahan. Beberapa di antara pekerja perempuan menjadi gundik untuk orang Eropa. Namun tidak semua perempuan mau melakukan perbuatan tersebut, beberapa di antaranya melarikan diri, bunuh diri atau menjadi gila karena merasa dipermalukan